

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGGAJIAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI

Elin Primana Sinaga✉, Mulatua P. Silalahi, Farida Sagala

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia

Email: elinprimanasinaga@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/siakun.V2N1.H27-32>

ABSTRACT

This study aims to examine the internal control system of employee payroll at the Secretariat of the Binjai City Regional House of Representatives (DPRD). The type of study employed by the author in this internal control system over the employee payroll at the Secretariat of the Binjai City DPRD. The data used includes both primary and secondary data. Data collection techniques employed in this study are interviews and documentation. The study's findings indicate that the internal control system over employee payroll at the Secretariat of the Binjai City DPRD is fairly effective. The organizational structure at the Secretariat of the Binjai City DPRD is well-established, as evidenced by the clear separation of duties and responsibilities among the employees. Sound practices at the Secretariat of the Binjai City DPRD have been implemented in accordance with established procedures, and the payroll information system has been effectively managed.

Keywords: System of Internal Control, Employee Salaries, DPRD Secretariat.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui sistem pengendalian internal penggajian pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Binjai. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu melakukan analisis pada sistem pengendalian atas penggajian pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Binjai. Data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan sistem pengendalian internal atas penggajian pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Binjai cukup baik. Struktur organisasi yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Binjai sudah baik, dilihat dari jelasnya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh masing-masing pegawai. Praktik yang sehat pada Sekretariat DPRD Kota Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan sistem informasi penggajian yang telah dilakukan secara efektif.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Penggajian Pegawai, Sekretariat DPRD.

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Internal ialah sebuah proses yang menyatu dalam setiap tindakan dan aktivitas yang dikerjakan dengan cara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, guna memberi keyakinan yang cukup dalam menggapai tujuan organisasi lewat operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, juga kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem penggajian di instansi pemerintah berbeda dengan sistem penggajian pada perusahaan pada umumnya. Sistem penggajian perusahaan cenderung bersifat komersial. Perbedaan ini muncul karena fokus utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik atau melayani masyarakat, sedangkan perusahaan komersial lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan atau profit.

Salah satu tujuan pengendalian internal pada sistem penggajian adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penipuan dalam proses penggajian. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu menerapkan pengendalian internal guna mencegah potensi manipulasi, penyimpangan, dan penipuan. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal yang diterapkan, lembaga pemerintah harus melakukan pengujian, yang dapat dilakukan dengan memeriksa prosedur yang berlaku serta menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan pengendalian internal tersebut.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diklasifikasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Adanya pelaksanaan sistem pengendalian internal atas penggajian pegawai yang kurang optimal
2. Adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang belum maksimal dalam sistem pengendalian internal atas penggajian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan ialah guna mengetahui apakah Analisis Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan terutama penggajian pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Binjai sudah efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal ialah persiapan dan metode organisasi untuk menjaga/melindungi aset, memperoleh informasi yang akurat dan bisa diandalkan, menambah efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Krismiaji 2015:218)

Berdasar yang dikemukakan Sujarweni (2019), tujuan pengendalian internal ialah :

- 1) Untuk menjaga kekayaan organisasi
- 2) Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan
- 3) Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan
- 4) Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen
- 5) Agar semua lapisan yang ada di perusahaan tunduk pada hukuman dan aturan yang sudah ditetapkan di perusahaan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ialah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilaksanakan secara menyeluruh pada pemerintah pusat dan daerah/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, unsur sistem pengendalian internal :

- 1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
- 2) Penilaian Risiko (Risk Assessment)
- 3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
- 4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
- 5) Pemantauan (Monitoring)

Penggajian

Penggajian dalam pemerintahan adalah proses perhitungan dan pembayaran upah atau gaji kepada pegawai negeri atau karyawan pemerintah atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Penggajian dalam pemerintahan juga melibatkan pemenuhan kewajiban administratif, termasuk penyusunan laporan keuangan, pengurusan pajak, dan pemenuhan regulasi yang ditetapkan oleh otorisasi pemerintah terkait.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, juga melakukan penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam melakukan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian Terdahulu

Fauziah, Neng Setiawan, Anggri (2020) melakukan penelitian judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penggajian Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari menjalankan sejumlah langkah penting, seperti peninjauan kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengawasan fisik terhadap aset, penetapan serta evaluasi indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian signifikan, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatannya, akuntabilitas sumber daya beserta pencatatannya, serta memastikan dokumentasi yang baik. Ghosi Murtado (2021) melakukan penelitian judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penggajian Pada UMKM KIA Sport Lawang Kab. Malang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem penggajian masih banyak mesti dilakukan perbaikan, juga pengendalian internal yang lemah, sehingga sistem tersebut belum berjalan dengan baik. Namramadanis (2022) melakukan penelitian judul Analisis Pengendalian Intern Sistem Penggajian Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pengendalian intern dalam sistem penggajian di Kantor Camat Benai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 2008 meskipun belum sepenuhnya maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai Sistem Pengendalian Internal atas Penggajian Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Binjai.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Binjai yang berlokasi di Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara – 20741.

Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh lewat wawancara dengan bagian keuangan Kantor DPRD Kota Binjai. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui catatan dan dokumen seperti struktur organisasi dan dokumen prosedur gaji.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang dipakai guna memperoleh data ialah penelitian lapangan (field research) dengan cara :

- a. Dokumentasi, seperti Struktur Organisasi, Amprah Gaji, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Verifikasi, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b. Wawancara

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis kualitatif deskriptif. Teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan menggambarkan sistem pengendalian internal yang ada dalam sistem penggajian pada Sekretariat DPRD Kota Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengendalian internal merupakan pengendalian yang sangat mendukung pemimpin dalam melaksanakan tugasnya di suatu organisasi, karenanya memiliki peran signifikan bagi pemerintah, yang secara keseluruhan memiliki tujuan guna mencegah dan menghindari kesalahan, kecurangan, penyimpangan, serta bentuk manipulasi lainnya di Sekretariat DPRD Kota Binjai.

Prosedur Penggajian Sekretariat DPRD Kota Binjai

1. Status Kepegawaian

Adapun status kepegawaian yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Binjai dimulai dari Anggota DPRD yang berstatus pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD, Tim Pakar/Staf Ahli, dan Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Kota Binjai

2. Prosedur Penggajian

Adapun prosedur yang dilakukan dimulai dari : Bagian penggajian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai akan menghimpun data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Binjai guna penentuan komponen gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), hasilnya berbentuk amprah gaji dan kemudian amprah gaji tersebut akan dibagikan kepada setiap Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan pengajuan gajinya

3. Prosedur Waktu Pembayaran

Gaji Pegawai Sekretariat DPRD Kota Binjai dibayarkan setiap awal bulan sebelum mereka melaksanakan tugas dan pekerjaan. Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Binjai dibayarkan setiap awal bulan berikutnya sesudah melaksanakan tugas/pekerjaan.

Adapun kelengkapan berkas pembayaran yaitu :

- a. Surat Perintah Membayar (SPM)
- b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran (SPTJM Pengguna Anggaran)
- c. Surat Verifikasi
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat unsur-unsur sistem pengendalian internal atas penggajian yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Binjai sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Pada struktur organisasi, terdapat pembagian tugas atau pemisahan tugas pada masing-masing unit kerja, sehingga para pegawai dapat memiliki fokus pada tugasnya saja

b. Prosedur Pembayaran Gaji

Untuk memperoleh pengendalian internal penggajian yang baik dan tidak adanya penyelewangan, maka memang sudah seharusnya seluruh pegawai tanpa terkecuali mendapatkan gajinya dengan rekening masing-masing, bukan hanya untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, agar para tenaga kerja pada Sekretariat DPRD Kota Binjai berjalan dengan baik

c. Praktik yang Sehat

Pemerintah Kota Binjai turut melibatkan pegawai Sekretariat DPRD Kota Binjai sebagai anggota Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebanyak 3 orang, yaitu Sekretariat DPRD, Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Program dan seorang staf Sekretaris DPRD Kota Binjai yang dalam

pelaksanaan pengawasan, ketiganya melakukan pemeriksaan dan evaluasi per-semester selama setahun.

Beberapa temuan pemeriksaan yang dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses penggajian pegawai Sekretariat DPRD Kota Binjai adalah terdapat pembayaran gaji/honor Staf Ahli yang tidak dilengkapi dengan laporan staf ahli mengenai permasalahan yang dialami Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai tugasnya, yang tentu pembayaran seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu Staf Ahli melaporkan kinerja selama periode tertentu.

Temuan lainnya adalah adanya kesalahan perhitungan Tunjangan Jabatan ASN yang dipindahkan ke instansi lain, penggajiannya belum dipindahkan ke instansi lainnya. Penggajian tidak menjadi masalah jika pegawai yang pindah masih berada pada jabatan yang sama.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Sekretariat DPRD Kota Binjai telah menetapkan sistem informasi penggajian secara efektif, hal ini bisa diamati dari adanya prosedur perhitungan, pencatatan dan pembayaran gaji yang telah dilaksanakan
2. Sistem penggajian yang ada pada DPRD Kota Binjai sudah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang diterapkan Sekretariat DPRD Kota Binjai. Pemisahan tugas dan tanggung jawab dapat memperlihatkan bahwa tidak satupun bagian yang melakukan suatu transaksi penggajian dari awal hingga akhirnya, dan masing-masing bagian yang terlibat saling mengawasi satu sama lain, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan/kecurangan
3. Pada sistem akuntansi penggajian Sekretariat DPRD Kota Binjai dapat membantu manajemen dalam pengendalian internal terhadap penggajian sehingga tidak mudah terjadi kecurangan dalam perhitungan gaji

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen* (Edisi 1). Jakarta: Kencana.
- Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi* (Edisi 1). Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 4). Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardjo, S. S. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi* (Edisi 1). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wakhyudi. (2018). *Pengendalian Lunak : Aspek Humanisme dalam Sistem Pengendalian Internal Intern* (Edisi 1). Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Sumber Jurnal

- Fauziah, Setiawan, N., & Anggri. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penggajian Aparatur Negara Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari. *CITRA EKONOMI*.
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11583>). Diakses 12 Desember 2023.
- Murtadho, G. (2021). Analisis sistem pengendalian internal atas penggajian pada UMKM KIA Sport Lawang Kab.Malang. (<https://repository.um.ac.id/272169/>). Diakses 12 Desember 2023.

Namramadanis. (2022). Analisis Pengendalian Sistem Intern Penggajian pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 976-994.
(<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2397>). Diakses 12 Desember 2023

Nurnaluri, S. (2019). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.

Sumber Website:

(<https://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>). Diakses 12 Desember 2023

(<https://jdih.binjaikota.go.id/images/file/23No%2027%20THN%202016.pdf>). Diakses 8 April 2024

Sumber Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah